

Jalan Dakwah PKS dalam Tubuh Muhammadiyah (Kasus di Yogyakarta dalam Perspektif Politik Hannah Arendt)

Oleh: Nur Wahid

Pegiat di Institute for Islamic Thought (IIT) Yogyakarta

Abstrak

Sebagai partai politik sekaligus merupakan perwujudan dari gerakan *Tarbiyah* afiliasi *Ihkwanaul Muslimin*, PKS menjalankan agenda dakwahnya dengan jalan merangsek masuk ke dalam aset milik Muhammadiyah. Kasus yang terjadi di Yogyakarta memperlihatkan bagaimana politik *cum* dakwah PKS secara infiltratif lewat kader-kader *Tarbiyah* perlahan mampu merubah haluan kader-kader Muhammadiyah untuk masuk kebarisannya. Jalan dakwah PKS dalam tubuh Muhammadiyah demikian dekat dengan nuansa politik menuju tegaknya negara yang berbasis Islam, seperti yang terkonsepsikan. Melalui tilikan pemikiran politik Hannah Arendt, memperlihatkan politik yang terkait masih dalam kerangka penguasaan satu sama lain, dan dakwah yang berjalan berbingkai kepentingan kekuasaan. Sebagai manusia politis yang adalah manusia tindakan, seharusnya tiap manusia berani tampil mengemuka ke ruang publik membawa kebebasannya. Kebebasan untuk (*freedom*) tanpa menafikan perbedaan yang ada, serta menanggalkan ruang privat kehidupannya, mandiri, dengan itulah manusia berhadap-hadapan dengan yang lain ditengah kenyataan hidup yang tidak satu wajah. Politik harus diluar kepentingan, termasuk dakwah, agama sekalipun.

Kata kunci: Dakwah, PKS, Muhammadiyah, Politik Hannah Arendt

A. Pengantar

Persinggungan antara satu entitas dengan entitas lain, sudah barang tentu terjadi di tengah perbedaan dan keragaman. Kebersinggungan yang berlangsung bisa jadi timbul sebagai bentuk tegur sapa, saling memahami, berdialog, sampai pada kemungkinan terjadinya friksi atau konflik. Baik dalam politik maupun , . Dalam kategori kepentingan politik, dalam usaha meraih kekuasaan, maupun dalam kerangka dakwah “berlomba-lomba dalam kebaikan” serta

dalam bingkai “mengajak kepada kebaikan, mencegah keburukan” terkadang diupayakan dengan berbagai jalan. Jalan secara kultural, maupun jalan politik, dipilih masing-masing entitas sebagai cara beradanya maupun sebagai strategi dalam bertahan hidup. Seperti Muhammadiyah (1912) sebagai organisasi keagamaan yang reformis-modernis,¹ maupun Nahdhatul Ulama (1926) sebagai organisasi Islam tradisional,² dua organisasi besar Islam di Indonesia, masing-masing pernah menapaki jalan tersebut.

Jalan politik yang ditempuh Muhammadiyah dan NU, namun bukan dalam arti politik praksis: membentuk partai, lalu menjadikannya sebagai kendaraan politik untuk meraih kekuasaan. Jalan politik keduanya, lebih sebagai bentuk sikap politik organisasi atas persoalan yang terjadi, menjawab problem keumatan, yang jauh dari penuntutan legalisasi Syariat Islam, maupun Daulah Islam. Dari segi dakwah, Muhammadiyah maupun NU, sama-sama bergerak dengan mengedepankan warna Islam yang moderat, dengan masing-masing kultur yang lekat padanya. Islam yang moderat, dalam artian disini: menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan sekaligus sebagai garis batas untuk membedakan dengan gerakan Islam garis keras yang cenderung menafikan kelompok diluar dirinya, serta yang ingin menjadikan Islam terwujud dalam bentuk negara.

Sebagai negara mayoritas berpenduduk beragama Islam, Indonesia kian menjadi sasaran ekspansi gerakan-gerakan Islam yang secara kultur, maupun ideologi gerakannya “asing”, namun “menggoda”-selain juga punya daya tarik tersendiri-bagi sebagian kalangan tertentu. Gerakan-gerakan Islam yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari latar belakang keislaman, kondisi sosial, ekonomi, politik yang berkembang. Terlebih pasca reformasi, seiring mulai mekarnya demokrasi pasca Soeharto turun, tahun 1998. Pasca reformasi menjadi satu titik pijak, langkah, terbukanya kesempatan bagi gerakan Islam transnasional masuk dan mulai menancapkan taring gerakan, pengaruh dan menebar ajaran-ajarannya. Secara umum gerakan Islam dalam pengerian normatif-ajaran, pada dasarnya adalah gerakan yang ingin menjadikan nilai-nilai Islam, menghujam kedalam setiap sendi hidup dan kehidupan masyarakat.

Namun pemaknaan atas nilai Islam yang mana, yang kemudian muncul banyak penilaian, tafsir, serta beragam aliran pemikiran, konsep dan praksisnya. Pada sisi lain, muncul dan menyebarnya

1 Secara umum dikatakan demikian: reformis maksudnya adalah sebagai suatu gerakan pembaharu (*tajdid*) dalam hal pemahaman dan praktek keberislaman, sedang modernis lebih berpatok pada desain gerakan.

2 Begitu juga tentang Nu-Tradisional, dalam arti gerakan Islam yang memiliki kesadaran diri tradisionalisme (*self-consciousness traditionalism*).

gerakan Islam yang masuk di Indonesia, kuat dipengaruhi (sebab) oleh perkembangan pemikiran (pembaharu) dalam Islam, seperti pemikiran dari Ibnu Taymiyyah-lahir di Harran, Damaskus (1263-1328), Muhammad bin Abdul Wahab-lahir di Najd, Saudi Arabia (1703-1793), Jamaluddin al-Afghani-lahir di Asadabad, Afghanistan (1839-1897), Muhammad Abduh-lahir di Mesir (1849-1905), Abul A'la Maududi-lahir di India (1903-1979), Hassan al-Banna-lahir di Mesir (1906-1949), Sayyid Qutb-lahir di Mesir (1906-1966), dan lain-lain. Dari sini, nilai-nilai dalam Islam kemudian diformulasikan menjadi basis ideologi, arah pergerakan dan perjuangan, jalan *jihād*, sampai-sampai demi tujuan terwujudnya tatanan masyarakat dan negara seperti yang dibayangkan.

Islam dalam konteks gerakan, atau dalam kategori Deepa Kumar, Islam ketika itu tampil dalam wajah Islam politik.³ Islam dalam kategori demikian, membawa kepentingan politik tertentu dan kekhususan tafsir yang dipakai sebagai legitimasi. Kepentingan politik dan kekhususan tafsir yang tergali dari latar belakang para tokoh-tokoh pembaharu dalam pemikiran Islam diatas, bagaimana tipikal masing-masing gerakan, kultur yang lekat dan yang akan dibawa serta, dari sana dapat diketahui, yang secara umum terkonsentrasi pada kawasan India dan di Timur Tengah. Di India dan Pakistan, akan didapati gerakan Islam berupa-wajah *Jama'ah Tabligh*. Di Saudi Arabia dan Yaman, corak dan kultur yang tampil dari gerakan Islam berupa-wajah *Wahabi-Salafi*. Lain halnya di Yordania, gerakan Islam yang terlahir berupa-wajah *Hizbut Tahrir*. Di Mesir, gerakan Islam berupa-wajah *Ikhwanul Muslimin*. Dari semua tipikal gerakan Islam ini, kini sudah menapakkan kaki, berkembang di Indonesia.

3 Deepa Kumar dalam buku *Islam Politik Sebuah Analisis Marxis* (judul asli: *Political Islam: A Marxist Analysis*), menganalisis Islam dalam alur materialisme historis-nya Marx. Hasilnya sangat menarik, bahwa perkembangan peradaban Islam, tidak selalu berlandaskan pada nilai ajaran, tetapi juga terbentuk oleh kondisi material. Islam politik, menurut Kumar, adalah hasil penafsiran kembali Islam dalam rangka mencapai tujuan politik secara khusus. Lihat Deepa Kumar, *Islam Politik Sebuah Analisis Marxis (Political Islam: A Marxist Analysis)*, penj. Fitri Mohan, (Yogyakarta: Resist Book, 2012). Resensi buku ini dapat dilihat pada: Nur Wahid, "Dilema Islam Politik" dalam *Lampung Post*, 24 Februari 2013. Resensi lebih panjang lagi dapat juga dilihat pada: Dicky Dwi Ananda, "Mendaras Islam Politik dengan Kerangka Materialisme Sejarah", dalam *Indoprogress.com*, 22 Juli 2014. Terkait Islam politik lihat juga: Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi dan Teori* (Yogyakarta: SukaPress, 2012),—mengutip pendapat Giller Kapel dalam bukunya *Jihad: The Trail of Political Islam*,—mendefisikan Islam politik: sebagai gejala sosial politik diberbagai belahan dunia yang berkaitan dengan aktifitas sekelompok individu Muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologis yang diyakini bersama. Dalam definisi ini, Islam politik dikonseptualisasikan terutama bukan sebagai gejala keagamaan, tetapi lebih merupakan fenomena sosial-politik yang melibatkan sekelompok individu Muslim yang aktif melakukan gerakan didasari ideologi terutama yang mereka yakini. hlm. 2-3.

Gerakan-gerakan Islam dalam beragam rupa-wajah tersebut, secara kultur gerakan berusaha meng-Arab-kan atau men-Timur-Tengah-kan kultur dan keislaman orang, masyarakat muslim Indonesia, yang sudah barang tentu menimbulkan perselisihan, konflik. Secara terorganisir dan kontinu, gerakan-gerakan Islam transnasional itu terus bergerak secara ekspansif, infiltratif, dan salah satunya dengan membentuk partai, serta mendorong berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah berlabel Syariat Islam. Gerakan Islam transnasional akan terus bergerak, sampai pada impian akhir yaitu terbentuknya Negara Islam di Indonesia. Misi dakwah demikian, jelas menimbulkan kerisauan yang serius bagi kaum Muslim pada umumnya yang tidak menghendaki adanya gerakan semacam itu. Kekhawatiran juga muncul dari kalangan intelektual muslim dan organisasi Islam, terutama dalam hal ini Muhammadiyah dan NU. Keduanya terus berupaya bersama menangkal gerakan Islam dari luar tanah air Indonesia (dalam mempertahankan Bhineka Tunggal Ika, UUD 45, Pancasila dan NKRI, serta kultur keislamannya), dari jaringan ideologi global seperti Wahabi dan *Ikhwanul Muslimin*.⁴

B. Dakwah PKS dalam Tubuh Muhammadiyah

Mengenai salah satu dari gerakan Islam yang berupa-wajah *Ikhwanul Muslimin*-Mesir,⁵ keberadaannya di Indonesia, merasuk

4 Salah satu usaha untuk menangkal gerakan Islam dalam bentuk-penelitian yang berlangsung lebih dari dua tahun dan dilakukan oleh LibForAll Foundation—buku berjudul *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, yang dieditori oleh Abdurrahman Wahid. Dalam pengantarnya, Wahid menyampaikan bahwa: “Studi ini kami lakukan dan publikasikan untuk membangkitkan kesadaran seluruh komponen bangsa, khususnya para elite dan media massa, tentang bahaya ideologi dan paham garis keras yang dibawa ke tanah air oleh gerakan transnasional Timur-Tengah dan tumbuh subur seperti jamur di musim hujan dalam era reformasi.” hlm. 40. Lihat lebih lanjut, Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009).

5 Mengenai munculnya gerakan *Ikhwanul Muslim*-Mesir sendiri, diawali peristiwa: “Jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ke tangan bangsa Eropa, menimbulkan kondisi rawan di kawasan Arab, khususnya Mesir, sehingga negeri ini menjadi ajang propaganda anti-Islam. Di tengah kerawanan tersebut, muncul gerakan *Ikhwanul Muslimin* yang berikhtiar mengembalikan umat Islam pada pemahaman dan amaliah Islam yang benar. Organisasi Islam terbesar di Mesir yang lahir pada tahun 1928 ini oleh pendirinya (Hasan al-Banna) dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran beragama, membangun kehidupan sosial, serta menumbuhkan daya juang melawan kolonialisme, ateisme, sekulerisme, westernisasi dan berbagai propaganda anti-Islam. Sisi menarik dari gerakan *Ikhwan* ini bukan saja manuver politiknya yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya, tetapi juga metode pendidikannya yang efektif dalam menggalang

dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejarah singkat partai politik yang berbasis Islam ini—dengan nama awal Partai Keadilan (PK)—berdiri pada 20 Juli 1998, dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.⁶ Latar sejarah dan keberadaan PKS di Indonesia dikemudian hari, tidak bisa dilepaskan dari gerakan *Tarbiyah*.⁷ Gerakan *Tarbiyah* sendiri pada awal kelahirannya tahun 1970-an dan 1980-an, merupakan gerakan dakwah kampus yang menggunakan sistem pembinaan *Tarbiyah Ikhwanul Muslimin-Mesir*.⁸ *Tarbiyah* dalam konsep *Ikhwanul Muslimin*, mengandung pengertian: cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung lewat ucapan, maupun secara tidak langsung ditunjukkan dengan tingkah laku, keteladanan, untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik.⁹ Ditempuh diantaranya lewat pengajian dalam naungan Lembaga Dakwah Kampus (LKD), dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dalam kegiatan *Rohis* (Rohani Islam), *Usrah* (keluarga), *Halaqah/Liqa'* (pertemuan), *Rihlah* (wisata; kemah), *Mabit* (malam bina iman dan taqwa) dan lainnya, dibawah bimbingan *Murabbi* (pendidik; guru).

PKS sebagai gerakan *Tarbiyah*, mulai membangun diri lewat kegiatan dakwah di kampus-kampus terkemuka di Indonesia. Di samping juga menerbitkan majalah *Ummi* dan *Sabili* serta lewat buku-buku terbitan *Gema Insani Press*, yang sekaligus menjadi wahana pembinaan, media informasi dan komunikasi pemikiran *Tarbiyah*.¹⁰ Semakin ke sini, semakin kentara bahwa antara gerakan *Tarbiyah*,

kesatuan dan memobilisasi umat sedemikian besar. Metode inilah yang kemudian menjadi bahan rujukan bagi organisasi-organisasi Islam, bukan saja di Timur-Tengah, tetapi juga di Dunia Islam lainnya.” Lihat sampul belakang buku karya Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid I&2, (judul asli: *Manhaj at-Tarbiyah inda al-Ikhwanul Muslimin*) penj. Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

6 Mengenai sejarah ringkas PKS, lebih lanjut dapat dilihat pada situs pks.or.id.

7 Seperti yang ditunjukkan dalam buku karya Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2001) yang membahas mendetail tentang gerakan tarbiyah, sejarah, tokoh, aktivitas dan lain-lain, sampai bermuara pada terkait gerakan tarbiyah yang bermetamorfosis menjadi PKS. Buku karya M. Imdadun Rakhmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta, LKIS, 2008) juga serupa: gerakan politik PKS di Indonesia. Dan beberapa buku diantara lainnya, dalam catatan kaki sebagai rujukan tulisan ini.

8 Lihat sampul belakang buku Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006).

9 Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 21.

10 Aay Muhammad Furkan, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, (Bandung: Teraju, 2004), hlm. 133.

Ikhwanul Muslimin dan PKS sulit dilepas-pisahkan, ketiganya mengait satu sama lain.¹¹ Dalam perkembangan terakhir, PKS dengan mengusung jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih *Tarbiyah* dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, telah “berhasil” mengubah wajah Islam Indonesia.¹² Namun, ke-“berhasil”-an PKS mengubah wajah Islam, sampai pula mengubah haluan pada kalangan Muhammadiyah, tidak serta merta berjalan mulus, bebas dari persinggungan, gesekan, friksi maupun konflik dengan entitas lain, yang sudah lebih dulu ada mewarnai tradisi dan kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam tulisan ini kaitannya dengan Muhammadiyah.

Perjumpaan PKS terutama dengan Muhammadiyah, menyasar pada lahan garap dakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*) keduanya yang berhimpitan-dalam skala tertentu bertumbukan. Jalan dakwah PKS mula dari infiltrasi kader-kader *Tarbiyah* menuggangi amal usaha, masjid, lembaga pendidikan, kesehatan dan fasilitas lain milik Muhammadiyah demi tujuan politiknya, seperti yang terjadi di Temanggung,¹³ dalam kasus perebutan Masjid Al-Muttaqun, di Prambanan, Klaten, pasca gempa bumi tahun 2006.¹⁴ Di Yogyakarta,

11 Dalam hal ini, Yon Machmudi menyimpulkan bahwa: “Gerakan *Tarbiyah* sendiri yang mendapatkan pengaruh dari gerakan *Ikhwanul Muslimin* mulai mengokohkan eksistensinya di Indonesia dengan mendirikan partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera”. Lihat Yon Machmudi, *Partai Keadilan: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung: Harkatuna Publishing, 2005), hlm. 23. Hal senada juga disampaikan oleh M. Imdadun Rahmat, bahwa “Kelahiran gerakan *Tarbiyah* di Indonesia terinspirasi oleh berbagai pemikiran *Ikhwanul Muslimin*. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, pemikiran *Ikhwanul Muslimin* sangat mempengaruhi gerakan *Tarbiyah* yang berkembang menjadi Partai Keadilan dan Kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera.” Lihat M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 83.

12 Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, hlm. 20.

13 Seperti termuat dalam rubrik Surat Pembaca *Suara Muhammadiyah* (2006), kabar tentang gerak salah satu partai politik “*Tarbiyah*” di Temanggung. Badrun Mustofa, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Temanggung, menyampaikan informasi tentang penggunaan Lembaga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sebagai media propaganda. SD Muhammadiyah di *bedol* untuk digunakan sebagai model awal pendirian SD yang lain. Mereka juga mengadakan kajian dengan tema-tema persatuan dan uhkuwah, tetapi dengan cara menjelek-jelekan tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan bergabungnya Pemuda Muhammadiyah ke barisan mereka. Lihat Bardrun Mustofa, ““*Tarbiyah*” Masuk Muhammadiyah Temanggung”, dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-30 Juni 2006. hlm. 5.

14 Awalnya mereka meramaikan masjid, membuat aneka kegiatan, sebagai tukang bersih-bersih masjid, sambil memperhatikan pola kepemimpinan Kyai setempat. Lama-kelamaan mereka mulai menawarkan bantuan, mengajak kader yang lain menjadi pengisi acara, terus masuk menjadi pengurus, sampai akhirnya memegang kendali ketakmiran masjid. Masjid Al-Muttaqun dulu awalnya dikelola oleh Muhammadiyah. Masalah dimulai ketika PKS membuka posko gempa bumi Yogyakarta (Mei 2006) dekat masjid. Posko itu kemudian berkembang jadi tempat rekrutmen kader PKS, lewat aktifitas *Mabit*

persinggungan, gesekan, friksi dan konflik yang melibatkan kader *Tarbiyah*, PKS dalam tubuh Muhammadiyah sampai terjadi “migrasi jama’ah”. Secara kongkrit, dari catatan Asrori Ma’ruf berikut ini, memberi gambaran adanya aktifitas *Ikhwanul Muslimin* (PKS) melalui kadernya, yang semula adalah kader Nasyiatul Aisyiyah (NA), terjadi dalam lembaga setingkat Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA). Tanpa diduga:

Pada sebuah penyelenggaraan Rapat Kerja PDNA Kab. Bantul bulan Ramadan 1426 H/Oktober 2005, tampil seorang kader NA yang telah beralih ke PKS bernama [inisial] AW, anak Hj. Zzm Ketua Majelis Tabligh PWA DIY, dengan sikap tegar dan percaya diri menyampaikan argumentasi sikap “*apa salahnya seorang kader NA untuk memahami dan kemudian mengikuti ideologi lain, termasuk Ikhwanul Muslimin, sekalipun?*”... apalagi disertai pula menyebutkan ibundanya yang seorang aktivis PW Aisyiyah Propinsi DIY.¹⁵

Peristiwa itu, sontak membuat para hadirin yang mengikuti forum tercengang. Rupanya, konvensi ideologi menimpa Angkatan Muda Muhammadiyah ke ideologi PKS bukan sekedar desas-desus, tetapi memang nyata terjadi. Kasus lain, yang lebih tegas lagi, sampai terjadi “migrasi jama’ah”, menimpa struktur kepengurusan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiah (PCNA) Kec. Bantul, periode 2004-2006:

Surat dari Ketua 1 PCNA Kec. Bantul, [berinisial] TWD... tertanggal 12 Agustus 2005 tentang pengunduran diri. Dalam suratnya itu [yang] bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua PCNA Kec. Bantul pada periode 2004-2006 sembari menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa meneruskan mengemban amanah. Ternyata dua belas hari kemudian pengunduran diri ketua itu diikuti oleh sebanyak 13 (tiga belas) fungsionaris PCNA Kec. Bantul... Klausul dalam surat mereka itu ternyata merasa lebih mantap untuk memilih jalan dakwah dengan memelihara nilai-nilai syar’i, kata mereka.

Yang membuat penulis heran ialah [mereka] merasa mantap di bidang dakwah, tetapi realitasnya masuk partai politik yang amat praktis, bahkan mereka ini tidak merasakannya. Akhwat (demikian ini menurut istilah dan bahasa mereka), sedang istilah bagi rekan-

(malam bina iman dan taqwa), dan *Liqo’*. PKS akhirnya berhasil “merebut” masjid. Kini pengelolaan Masjid Al-Muttaqun dialihkan ke sebuah yayasan bernama Yayasan Al-Muttaqun, dengan Hidayah Nur Wahid sebagai ketua dewan pembina masjid. Lihat Ari Nur Azizah dan Ma’arif Jamuin, “Konflik Politik PKS dan Muhammadiyah”, dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. 10. No. 2. Desember 2012 (Surakarta: LPID UMS, 2012), hlm. 219-220.

15 Asrori Ma’ruf “Gesekan Ideologi Ikhwanul Muslimin (PKS) dengan Muhammadiyah” dalam Zakiyuddin Baidhawiy dkk, *Migrasi Jamaah: Tantangan Dakwah Muhammadiyah Jelang Satu Abad*, (Yogyakarta: Panji, 2007), hlm. 41-42.

rekan pria mereka sebut ikhwan yang tentu saja kependekan dan kebanggaan dari *Ikhwanul Muslimin*.¹⁶

Infiltrasi yang dilakukan PKS dalam tubuh Muhammadiyah yang lain disampaikan oleh Farid Setiawan. Dalam artikel yang pertama-dimuat *Suara Muhammadiyah*—Farid menganggapi tulisan Abdul Munir Mulkan tentang apa yang terjadi di Sedang Ayu.¹⁷ Farid menyampaikan bahwa apa yang dilakukn oleh kader-kader *Tarbiyah* (PKS) dengan “menggaskan” masjid Muhammadiyah itu, bekerja seperti “virus”. Ia akan menyebar, bergerak senyap, dan tanda diduga, tahu-tahu sudah beralih begitu saja. Farid mendesak agar Muhammadiyah segera mengampulasi “virus Tarbiyah” itu.¹⁸ Berselang dua bulan kemudian, artikel kedua dari Farid Setiawan dimuat *Suara Muhammadiyah*, masih menyoroti tentang “virus Tarbiyah”, kali ini yang tengah menjangkiti Sekolah/Madrasah Mu’alimin dan Mu’alimat milik Muhammadiyah. Dalam tulisannya, Farid menyampaikan bahwa:

...transformasi ideologi di kedua madrasah tersebut, lama-kelamaan mulai memudar dan bahkan mulai tidak kelihatan. Perubahan ini di samping karena tingginya persaingan serta cuaca global yang kurang mendukung perkembangannya madrasah, juga karena mewabahnya “virus tarbiyah” yang makin menggurita. “Virus tarbiyah” tersebut sebagian besar memasuki urat nadi kepengurusan madrasah, dari guru sampai pendamping asrama yang biasa disebut *musyrif* dan *musyifah*.

Dalam bentuk kaderisasi, mereka cenderung menggunakan sistem yang berbeda dengan Muhammadiyah seperti *Daurah*, *Liqa'*, *Ussrah*, *Daulah Islamiyah* serta doktrin *Jihad fi Sabilillah* yang diambil sebagai jargon suci dalam membakar semangat kader. Para fungsionaris “virus tarbiyah” tersebut sangat intens dalam membina, mendampingi

16 *Ibid*, hlm. 43-44. Nama-nama kader Muhammadiyah yang berpindah haluan ke PKS, dalam tulisan ini sengaja diinisialkan dan tidak disebutkan, dengan pertimbangan (etika jurnalisme) belum tentu yang bersangkutan, setuju namanya dicantumkan dalam buku tersebut.

17 Abdul Munir Mulkan menulis dalam *Suara Muhammadiyah*, tentang pergulatan warga Muhammadiyah ketika datang muballigh tamu ke masjid dan lingkungan di desa Sendang Ayu, Padang Ratu, Lampung, yang diboncengi kepentingan politik dari salah satu partai Islam. Dalam tulisan itu, Mulkan mengkhawatirkan, hal ini sebagai gejala umum yang menjadikan Muhammadiyah sebagai sasaran penyebaran ideologi partai, baik di pelosok daerah, maupun di kota-kota lain. Baca Abdul Munir Mulkan, “Sendang Ayu; Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan”, dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 Januari 2006, hlm. 23.

18 Lihat Farid Setiawan, “Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkan), dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 20 Februari 2006. Dapat juga dilihat dalam Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, hlm. 24. Farid Setiawan adalah Sekretaris Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.

serta mendidik santri-santri madrasah, untuk kepentingan menjaring kader-kader partainya yang berideologi lain itu.¹⁹

Untuk mengatasi masalah ini, lanjut Farid, mengusulkan tiga langkah penanganan. “*Pertama*, pembubaran kedua madrasah, serta menggantikannya dengan madrasah baru yang disertai pendampingan secara langsung dan total. *Kedua*, merombak sistem, kurikulum serta seluruh jajaran pengurus. *Ketiga*, melakukan pembedayaan maksimal terhadap organisasi otonom Muhammadiyah.”²⁰ Tidak berhenti sampai disini, apa yang diutarakan Farid dalam tulisannya ini, terutama menyangkut kebenaran fakta di lapangan dan ketiga gagasan langkah penanganan, mendapat tanggapan yang beragam, pro dan kontra, dari kalangan Muhammadiyah sendiri.²¹

Sejak dimuatnya beberapa tulisan dalam *Suara Muhammadiyah*—selama kurun tahun 2005-2006 dan beberapa kasus di daerah-daerah sebelum dan sesudahnya—menegaskan bahwa gerakan Tarbiyah (PKS) memang sudah merasuk dalam tubuh Muhammadiyah. Sampai kemudian, Haedar Nashir, salah seorang tokoh Muhammadiyah,

19 Farid Setiawan, “Tiga Upaya Menyelamatkan Mu’alimin dan Mu’alimat”, dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 April 2006, hlm. 28-29.

20 *Ibid.* hlm. 29.

21 Tanggapan atas tulisan Farid Setiawan, diantaranya, *pertama*, dari Rihdo Al-Hamdi, “Ber-*tabayyun*-lah Atas Soal Mu’alimin dan Mu’alimat (Tanggapan untuk Tulisan Farid Setiawan)”. Al-Hamdi adalah Sekjen Dewan Pimpinan IKMAMMM, menilai tulisan Farid terkesan mengada-ada. Tidak ada bukti yang menunjukkan “virus tarbiyah” telah masuk ke para pemimpinnya. Hanya sebuah luapan yang bersifat emosional tanpa dasar. *Kedua*, dari Sucipto, “Sekolah Kader Tidak Boleh Mati (Tanggapan untuk Tulisan Farid Setiawan)”. Sucipto adalah Guru SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, lebih menekankan bahwa setelah muncul tulisan Farid, hendaknya masing-masing pihak bergerak sesuai kewenangannya. Mengecek kebenaran fakta yang ada di lapangan. Jika ditemukan fakta yang valid, tidak salahnya mempertimbangkan tawaran yang diajukan Farid dengan beberapa pertimbangan. *Ketiga*, dari Abdul Muin Malilang, “Polemik Madrasah Mu’alimin dan Mu’alimat, Hiperbolis atau Keprihatinan?”. Malilang sebagai Wakil Ketua PDM Malang, Mantan Guru Madrasah Mu’alimat Muhammadiyah Yogyakarta, menilai esensi tulisan Farid tidak berporos pada penilaian model dan sistem pembelajaran yang dianut Madrasah. “Virus Tarbiyah” bukanlah isapan jempol saudara Farid, tetapi sudah merupakan wabah bagi Muhammadiyah dewasa ini. Mendapati banyak tanggapan atas tulisannya yang mengundang pro dan kontra, Farid Setiawan kembali menulis untuk menanggapi balik, “Transformasi Ideologi Muhammadiyah (Sebuah Tanggapan Balik atas “Masalah” di Mu’alimin dan Mu’alimat)”. Bahwa: Pilihan untuk menjadikan Madrasah tersebut sebagai salah satu studi kasus dalam kaitannya dengan krisis ber-Muhammadiyah merupakan pilihan yang tak bisa dihindarkan. Mengingat, kedua Madrasah adalah “jantung kaderisasi”. Tidak dapat dibayangkan jikalau “jantung kaderisasi” perserikatan justru dijadikan sebagai lahan subur untuk pembibitan kelompok lain yang ber-ideologi non-Muhammadiyah. Memang, sejauh ini kehalusan gerakan *Tarbiyah* sangatlah sulit untuk ditebak dan ditemukan secara langsung. Dan mengenai ulusan “pembubaran kedua sekolah”, sekedar “language game” semata, sekedar otokritik. Semua tulisan ini dapat dibaca dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-31 Mei 2006, hlm 29-35.

menulis buku *Manifestasi Gerakan Tarbiyah Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*, terbit tahun 2006, yang “didasarkan atas sejumlah kasus masuknya gerakan *Tarbiyah* di sejumlah lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.”²² Puncaknya adalah keluarnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah, terkait jalan dakwah yang dilakukan PKS dalam tubuh Muhammadiyah.

SKPP Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 tentang: Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam SKPP ini memutuskan sepuluh poin ketetapan, dengan terlebih dahulu menimbang, mengingat dan memperhatikan persoalan yang terkait. Dalam keputusan poin ketiga, dinyatakan bahwa:

Segecap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut.²³

Dengan keluarnya SKPP ini, semakin menegaskan bahwa PKS sebagai partai politik plus dakwah ala *Tarbiyah Ikhwanul Muslimin* telah merasuk dalam tubuh Muhammadiyah. Dari kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk melihatnya dalam kerangka pemikiran politik Hannah Arendt. Pemikiran politik Hannah Arendt digunakan sebagai cara untuk membaca apa yang dilakukan PKS menyangkut jalan dakwahnya dalam tubuh Muhammadiyah, dan sepiantas bagaimana pemikiran politik Hannah Arendt ditempatkan dalam konteks kekinian.

22 Buku tipis ini (tebal xii + 72 halaman), yang awalnya makalah, merupakan hasil penelaahan (studi) literatur mengenai gerakan *Tarbiyah* di Indonesia. Teruntuk kalangan Muhammadiyah sendiri maupun bagi aktivis yang lain, dengan harapan menjadi penggugah kesadaran dibalik geliat intervensi, infiltrasi PK/PKS dengan *Tarbiyah*-nya Ikhwanul Muslimin, khususnya di Muhammadiyah.

23 SKPP Muhammadiyah Nomor: 149/Kep./I.0/B/2006, dapat dilihat pada lampiran I dalam Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, hlm. 240-249.

C. Hidup dan Karya Hannah Arendt

Hannah Arendt adalah anak tunggal yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1906, di kota Linden dekat Hanover, Jerman, dari pasangan Paul Arendt—seorang insinyur yang bekerja di perusahaan listrik—dan Martha Cohn. Arendt dibesarkan di kota Königsberg dalam lingkungan komunitas Yahudi. Pendidikan awal Arendt diperoleh di rumah. Kakek Arendt, Jacob Arendt, adalah orang yang terdidik dalam tradisi *Aufklärung*. Dalam suasana pendidikan rumah demikian, tak heran pada usia 14 tahun, Arendt sudah mencoba membaca karya Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, Karl Jaspers dan lainnya. Arendt baru menempuh studi di Universitas Marburg pada tahun 1924. Ketika di Marburg, Arendt berjumpa dengan Martin Heidegger. Arendt terpesona pada pemikiran Heidegger, yang waktu itu adalah profesor muda cemerlang di Universitas Marburg. Pengaruh Heidegger tampak dalam kecenderungan Arendt mempelajari filsafat, sastra Yunani klasik, puisi dan beberapa dalam karyanya. Hubungan Arendt dengan Heidegger demikian dekat dan mendalam, dan hubungan itu sempat berkembang menjadi hubungan cinta. Setelah perang Dunia II, Heidegger sendiri mengakui, Arendt pernah menggairahkan dia dalam salah satu fase hidupnya.²⁴

Setahun di Marburg, Arendt lalu pindah ke Freiburg. Pada tahun 1926, atas saran Heidegger, Arendt pindah ke Universitas Heidelberg untuk belajar di bawah (mentor) Karl Jaspers. Di kampus Heidelberg ini, gelar doktor filsafat diraihnya, tahun 1929. Pada tahun ini juga, tepatnya Desember 1929, Arendt menikahi Günther Stren. Sebagai seorang perempuan Yahudi, Arendt punya pengalaman dramatis dengan Naziisme. Dalam wawancara dengan Günter Gaus, Arendt mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditahan sebentar di Berlin pada awal pemerintahan Hitler, dan di Gurs, Prancis Selatan, sebelum ia bersama ibu dan suaminya yang kedua, Heinrich Blücher, berhasil migrasi ke AS, tahun 1941.²⁵

24 Sindhunata, "Politik Pengampunan" dalam *Basis Edisi Khusus Hannah Arendt*, No.03-04, Tahun ke-56, Maret-April 2007, hlm. 43-44. Mengenai hubungan cinta kedua tokoh besar ini, selingkuh begitu, tersaji dalam karya Ełbieta Ettinger yang berjudul: *Hannah Arendt-Martin Heidegger* (Yale University Press, 1995). Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Selingkuh Dua Pemikir Raksasa Hannah Arendt-Martin Heidegger*, penj. P Hasudungan Sirait & Rin Hindryati P, (Jakarta: Nalar, 2005). Dalam catatan penerjemah disampaikan bahwa: setelah terbit, buku Ettinger ini mengundang reaksi, kritik dari banyak pihak, namun ada juga yang memuji karena dianggap sebagai terobosan. Kontroversi atas karya Ettinger terkait dengan bukti empirik korespondensi keduanya. Namun, Ettinger sendiri adalah peneliti pertama yang bisa mengakses arsip Hannah Arendt di New York dan arsip Martin Heidegger di Jerman, dengan seizin pihak eksekutor di lembaga tempat arsip keduanya berada.

25 F. Budi Hardiman, "Hannah Arendt: Berpikir dalam Keadaan Luar Biasa", Sebuah Pengantar dalam Agus Sudibyo, *Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2012), hlm. vi-vii.

Sebelum migrasi ke AS, pada tahun 1933 Arendt pindah dari Jerman ke Prancis, di mana ia bekerja membantu anak-anak pengungsi Yahudi ke Palestina. Arendt menikah untuk yang kedua kali dengan Heinrich Blücher pada tahun 1940. Sejak migrasi ke AS pada tahun 1941, sepuluh tahun kemudian Arendt menjadi warga negara AS. Arendt bekerja pada majalah *The New Yorker*. Arendt tercatat juga sebagai direktur riset *Conference on Jewish Relations*, pemimpin redaksi *Schocken Books*, direktur eksekutif *Jewish Cultural Reconstruction* di New York. Selain itu, Arendt adalah profesor tamu di beberapa universitas, termasuk di Universitas California, Princeton, Columbia, dan Chicago. Hannah Arendt meninggal pada 4 Desember 1975, di AS.²⁶

Pada Oktober tahun 2006 lalu, menjadi moment tersendiri, dunia memperingati 100 tahun lahirnya Hannah Arendt. Di mana-mana diadakan seminar untuk mengkaji kembali relevansi karya-karya filsuf perempuan zaman modern ini.²⁷ Mengenai karya-karya dari tokoh besar abad ke-20 ini, berikut diantaranya:

- *Love and Saint Augustine* (1929), sebuah disertasi doktoral, tentang konsep cinta St. Agustinus.
- *The Origin of Totalitarianism* (1951), sebuah kilas balik dan upaya untuk memahami pembunuhan massal Yahudi oleh Nazi. Bagian pertama membahas tentang *Antisemitism*, kedua *Imperialism*, ketiga *Totalitarianism*.
- *Rahel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman* (1958), tentang Kehidupan Seorang Perempuan Yahudi.
- *The Human Condition* (1958). Berisi pembahasan tentang kondisi dasar aktivitas manusia yang terdiri dari tindakan (*action*), kerja (*labor*) dan karya (*work*) yang terangkum dalam kata *vita activa*, serta keutamaan manusia tindakan (*man of action*) dibandingkan dengan manusia pekerja (*animal laborans*) dan manusia pencipta barang (*homo faber*).
- *Between Past and Future* (1961), yaitu Antara Masa Lalu dan Masa Depan.
- Pada tahun 1961, Arendt bertolak ke Yerusalem untuk melakukan kerja peliputan pengadilan Otto Adolf Eichmann, penjahat Nazi pelaku genosida lima juta orang Yahudi di Eropa. Hasil dari reportase itu kemudian terbit menjadi buku yang berjudul *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*

26 Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, (New York: Penguin Books, 1994), hlm. ii.

27 Sindhunata, "Tanda-Tanda Zaman: Berteguh pada Janji" dalam *Basis Edisi Khusus Hannah Arendt*, No.03-04, Tahun ke-56, Maret-April 2007, hlm. 3.

(1963). Buku ini menyulut kemarahan kalangan Yahudi karena mengkritik sikap komunitas Yahudi sendiri ketika berada di bawah rezim Nazi. Dari pengamatan tentang Eichmann itu, lahir teori tentang banalitas kejahatan dari Arendt.

- *On Revolution*, dipublikasi tahun 1963, merupakan refleksi Arendt atas momentum revolusi sebagai titik awal berdirinya negara Amerika abad ke-18, dalam perbandingannya dengan Revolusi Prancis.
- *Men in Dark Times* (1968), berisi kumpulan esai biografis beberapa tokoh abad ke-20. *Crises of the Republic* (1972), berisi kumpulan esainya di *New Yorker* dan *The York Review of Books* dalam menyikapi situasi politik kontemporer era 1960 hingga 1970-an.
- *The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age*, disunting oleh Ron H. Feldman (1978), yaitu tentang Orang Yahudi sebagai Bangsa Pariah: Identitas dan Politik Yahudi di Masa Modern.
- Karya Arendt yang terbit setelah ia meninggal yaitu *The Life of The Mind* (1979), yang terdiri dari dua bab *Thinking* dan *Willing*, dari tiga bab yang direncanakan yaitu tentang *Judgment*.²⁸

D. Pemikiran Politik Hannah Arendt: Membaca Dakwah PKS dalam Tubuh Muhammadiyah

Apa yang kita ketahui tentang politik, kurang lebih akan bertaut-kaitan dengan soal kekuasaan, pertarungan kepentingan, negara atau dengan pergulatan partai politik. Masing-masing mewarnai dan berjaln satu sama lain. Politik dengan kekuasaan, bahkan politik sama dengan kekuasaan, karena disana tujuan akhir dari politik. Dalam kancan pertarungan politik, siapa kawan siapa lawan, kerap bergontaganti, tidak menentu dan pasti keduanya, hanya kepentingan yang abadi dalam politik. Politik dalam kaitannya dengan negara, dengan begitu kehadiran negara adalah mengatur kehidupan masyarakat. Kaitannya meraih kekuasaan, lewat partai politik itulah salah satu kendaraannya.

28 Karya-karya Arendt tersebut, utamanya merujuk pada dua sumber berikut: dalam *Basis Edisi Khusus Hannah Arendt*, No.03-04, Tahun ke-56, Maret-April 2007 dan Agus Sudibyo, *Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2012), hlm. 6-8. Dalam pembahasan selanjutnya, akses untuk memahami pemikiran politik Hannah Arendt, penulis banyak mengambil penjelasan dari buku karya Agus Sudibyo—hasil pengembangan tesis pada Program Magister STF Driyakarya, Jakarta—ini.

Dalam era modern, secara umum, politik terlanjut dipahami dan dipraktekkan sebagai tindakan memimpin dan mengatur orang lain. Politik kemudian diidentikkan dalam kategori penguasaan dan pengendalian. Dalam hubungan antara negara dan warga, politik adalah otoritas maksimal negara untuk mengatur segi-segi kehidupan warganya, jika perlu dengan pemaksaan dan kekerasan. Politik dipraktekkan sebagai penundukan, penindasan melalui kekerasan, teror, penjajahan sebagaimana terjadi dalam totalitarianisme, imperialisme serta dalam Perang Dunia, yang menurut Arendt justru menghasilkan “yang apolitis”: pemaksaan, kekerasan, diskriminasi, dominasi, penundukan, penyeragaman dan sejenisnya.²⁹

Menurut Arendt, politik bukan seperti dalam kategori demikian itu, atau dengan kata lain, yang demikian itu adalah bentuk penyimpangan dari politik. Politik khas Arendt adalah politik dalam pengertian filosofis, yang nantinya menjawab problem kemanusiaan (kaitannya atas sistem yang menghasilkan ketunggalan), tentang kebebasan, dan kaitannya dengan ruang privat dan ruang publik, dimana masing-masing manusia secara otentik seharusnya mengaktual dalam kehidupan secara bersama-sama lewat tindakan politis tanpa pretensi menghilangkan keunikan masing-masing individu.

Pemikiran politik Arendt, pertama-tama, harus dipahami, merupakan respons atas totalitarianisme, dimana Arendt mempunyai pengalaman langsung atas hal itu. Totalitarianisme, menurut Arendt, bertujuan mengintegrasikan secara keseluruhan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ke dalam suatu pola tertentu, yang tidak saja mengharamkan semua bentuk oposisi, tetapi juga mencegah otonomi lembaga-lembaga masyarakat. Arendt mengindentikkan totalitarianisme dengan kejahatan karena ada aspek manipulatif di dalamnya. Antisemitisme sebagai unsur lain dari totalitarianisme di samping imperialisme, menurut Arendt, adalah rasisme yang dimanipulasi untuk menghabisi Yahudi.³⁰ Untuk menjelaskan secara ringkas—disini dibatasi hanya menyangkut—pemikiran politik Arendt yaitu tentang “politik yang otentik”, konsep “ruang privat”, “ruang publik” dan pengertian Arendt tentang “manusia politik sebagai manusia tindakan”, yang berpilin dan untuk ditegaskan satu sama lain.

29 Agus Sudibyo, hlm. 14-15.

30 Lihat sampul belakang buku Hannah Arendt, *Asal-usul Totalitarianisme Jilid I Antisemitisme*, penj. A. Agus Nugroho, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).

Pemikiran politik Arendt bertolak dari perspektif korban. Pemikiran filsafat politik Arendt, kata Franz Magnis Seseno: tidak dapat dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Kekuatannya ialah bahwa ia mendobrak faham-faham pemikiran (politik) yang sudah baku.³¹ Seperti tentang politik yang otentik, akan terwujud ketika individu yang berbeda-beda sekaligus setara bertindak dan berbicara untuk memutuskan perkara-perkara bersama secara argumentatif-diskursif dalam ruang publik yang pluralistik. Bagi Arendt, politik harus dipahami diluar kategori penguasaan dan pemaksaan. Jika lewat kategori penguasaan dan pemaksaan, tegas melahirkan yang apolitis. Disamping itu, Arendt menarik garis demarkasi antara ruang privat dan ruang publik, untuk menghindarkan politik atau ruang publik dari infiltrasi, desakan, substitusi tindakan ruang privat yang bersifat apolitis. Politik harus menjadi medium “kebersamaan dalam keberagaman” di mana setiap individu menanggalkan kepentingan pribadinya dan berempati terhadap posisi orang lain. Dalam hal ini kemudian, Arendt menegaskan dalam *The Human Condition*, bahwa tindakan (*action*) sebagai keutamaan manusia, bukan kerja (*labor*) atau karya (*work*).³²

Politik yang otentik adalah kondisi di mana manusia mendapatkan kebebasan untuk bertindak, berpikir dan memutuskan bagi diri dan lingkungannya. Kebebasan hanya terjadi ketika manusia dapat bertindak secara otentik dihadapan yang lain, dalam ruang kebersamaan. Arendt menyimpulkan bahwa politik itu adalah kebebasan.³³ Kebebasan dalam pengertian Arendt disini adalah kebebasan untuk (*freedom*), bukan kebebasan dari (*liberation*). F. Budi Hardiman mengungkapkan bahwa dengan pemikirannya yang orisinal, Arendt telah mencengangkan siapa saja yang memahami politik sebagai relasi antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Politik bukan dalam kategori demikian itu menurut Arendt, tegas Hardiman, politik tidak dapat dipahami dalam ketegori *Herrschaft* (dominasi), melainkan dalam ketegori *Freiheit* (kebebasan). Dengan kata lain: *Politik ist Freiheit*.³⁴

31 Franz Magnis Suseno, “Kata Pengantar” dalam *Asal-usul Totalitarianisme Jilid III Totalitarianisme*, penj. J.M Soebijanta, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. viii.

32 Agus Sudibyo, hlm. 13-14 & 72.

33 Hannah Arendt, *The Promise of Politics* (New York: Schocken Books, 2005), yang diedit dan dikomentari oleh Jerome Kohn, hlm. 108, dalam Agus Sudibyo, hlm. 63.

34 Hannah Arendt, *Was Ist Politik?*, (München: Piper, 1993), hlm. 11, dalam F. Budi Hardiman, *Massa, Teror dan Trauma Mengeledah Negativitas Masyarakat Kita*, (Yogyakarta: Lamalera, 2011), hlm. 26. Tulisan mengenai pemikiran Arendt dalam buku ini, Hardiman membahasnya pada Bab 2. *Arsitektur Keruntuhan Hannah Arendt tentang Krisis Res Publica*, hlm. 23-49.

Runga privat dan ruang publik yang suguhkan Arendt, merujuk pada tatanan masyarakat Yunani, dimana *oikos* dan *polis* Aristotelian sebagai titik pijaknya. Ruang privat adalah ruang di mana orang-orang disatukan oleh kepentingan bertahan hidup, sebagaimana terjadi dalam ruang keluarga. Sedangkan ruang publik adalah ruang yang dimiliki bersama oleh orang-orang yang setara.³⁵ *Polis* adalah sistem dan struktur negara di zaman Yunani klasik yang membedakan antara ruang privat (*oikos*, keluarga) dan ruang publik (*polis*, negara-kota). Dalam keduanya (*oikos* dan *polis*) berbeda dalam menempatkan posisi dan keberadaan manusia. Jika dalam *oikos* masing-masing orang memikirkan kepentingan pribadi atau keluarga untuk keberlangsungan hidup (keluarga, kelompok) mereka sendiri-sendiri. Sedangkan dalam *polis* manusia mewujudkan tindakannya demi kepentingan hidup bersama.³⁶ Dalam konteks *polis*, hanya dua aktivitas manusia yang bersifat politik dan kemudian menjadi unsur pembentuk apa yang disebut Aristoteles sebagai makhluk politik (*zoon politikon*),³⁷ yakni tindakan (*praxis*) dan percakapan (*lexis*).³⁸

Dengan menunjuk pada model *polis* Yunani, ruang publik sebagai ruang kebebasan, yang sekaligus sebagai ruang “penampakan” baru terwujud ketika manusia mampu keluar dari dominasi keluarga (; kelompok) dan masuk ke ruang publik, dimana semua manusia setara.³⁹ Disinilah ruang publik itu menjadi ruang penampakan manusia-manusia yang bebas untuk (*freedom*). Persoalannya tinggal, keberanian untuk tampil, serta konsekuensi yang harus diambil ketika mengemuka, hadir ke muka ruang publik.

Ruang publik sebagai ruang “penampakan”, sebagaimana dikutip oleh Hardiman, Arendt menyebut ruang itu sebagai *Erscheinungsraum*:

... ruang penampakan terjadi di tempat orang-orang saling berinteraksi dengan bertindak dan berbicara; ruang itulah yang menjadi dasar semua pendirian dan bentuk negara... Ruang itu ada secara potensial pada setiap himpunan orang, memang hanya secara potensial; ia tidak secara niscaya diaktualisasi di dalam himpunan

35 Agus Sudibyo, hlm. 39.

36 Fahmi Panimbang, “Politik sebagai Tindakan: Studi Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt”, dalam http://panimbang.blogspot.com/2006/01/politik-sebagai-tindakan_28.html. Diakses pada 8 November 2014.

37 *Zoon politikon* merupakan konsepsi Aristoteles tentang manusia itu adalah makhluk politik, yang—menurut fitrah dan tabiatnya—mencapai kesempurnaannya hanya dalam masyarakat dan negara. Lihat lebih lanjut dalam pembahasan oleh Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 27-45.

38 Agus Sudibyo, hlm. 39.

39 Hannah Arendt, *The Promise of Politics*, hlm. 30-31, dalam Agus Sudibyo, hlm. 42.

itu dan juga tidak dipastikan untuk selamanya atau untuk waktu tertentu...⁴⁰

Pemikiran politik Arendt tentang manusia politik sebagai manusia tindakan merupakan hasil pemaknaan manusia sebagai “yang politik”. “Manusia”, kata Arendt, “bukanlah manusiawi, kalau dia tidak politis.” Apa maksudnya? Eddie S. Royadi Langgut-Tere secara apik memadatkan dari keseluruhan pemikiran Arendt dalam pengertian (bukan tentang politik melainkan) tentang “manusia” yang seharusnya adalah “manusia politis”, seperti berikut ini:

Kalau “kebabasan adalah alasan adanya (*raison d’etre*) dari politik”, sementara pluralitas adalah kondisi inheren (*conditio per quam*) dan bukan sekedar prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) dari kehidupan politik (*bios politikos*), dan dengan demikian kebebasan dan pluralitas adalah dua sisi dari sekeping mata uang [dari “yang politis”], maka kebalikan dari kedua hal itu (ketidakbebasan dan ketunggalan) adalah apolitis. Sementara, manusia (*man*) bukanlah manusiawi (*human*) kalau tidak politis. Politik bukanlah sebuah alternatif bagi kehidupan manusia, melainkan sebuah pencapaian puncak eksistensinya, di mana ia menemukan kebenaran (jadi, politik adalah sebuah *aletheia*, *disclosure*, penyingkapan) bahwa ia adalah manusia. Mengapa begitu? Karena politik adalah ruang bagi tindakan (*vita activa*) dan pemikiran (*vita contemplativa*).⁴¹

Mengenai *vita activa* maksudnya merujuk kepada manusia di ruang publik, yang selalu mengandaikan dunia benda-benda, dunia bersama dan pluralitas antar manusia. Sedangkan *vita contemplativa* merujuk pada hidup kontemplatif para filsuf, para pemikir, di luar ruang penampakan bersama.⁴² *Vita activa* sendiri menekankan pada lingkup kehidupan aktif dimana kerja, karya dan tindakan adalah wujud fundamentalnya. Namun, hanya tindakanlah yang otentik dari aktifitas manusia dan yang membutuhkan kehadiran orang lain dalam

40 Hannah Arendt, *Vita Activa*, (München: Piper Verlag, 1996), hlm. 251, dalam F. Budi Hardiman (ed), *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokrasi” dari Polis sampai Cyberspace*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 187.

41 Eddie S. Royadi Langgut-Tere, *Manusia Politis Menurut Hannah Arendt Pertautan antara Tindakan dan Ruang Publik, Kebebasan dan Pluralitas, dan Upaya Memanusiakan Kekuasaan*, Makalah yang presentasikan pada Kuliah Umum Filsafat Komunitas Salihara, Jakarta, 6 April 2011, hlm. 1. Makalah dan rekaman dapat diunduh atau diperdengarkan pada www.salihara.org.

42 Agus Sudibyo, hlm. 75.

aktualisasinya. Karena hanya lewat tindakan itu saja manusia tampil dalam ruang publik bersama. Demikian maka ia dikatakan manusia politik sebagai manusia tindakan.

Mengenai tindakan sebagai aktivitas manusia menurut Arendt, dikutip oleh Maurizio Passerin d'Entéves, seperti berikut ini:

Tindakan adalah satu-satunya aktivitas manusia yang berhubungan langsung tanpa diperantarai oleh sesuatu atau benda yang sesuai dengan kondisi pluralitas manusia. [Keterikatannya dengan] pluralitas secara khusus merupakan sebuah keniscayaan—bukan hanya *conditio sine qua non*, namun juga *conditio per quam*—bagi semua kehidupan politik.⁴³

Selanjutnya, untuk membaca jalan dakwah PKS dalam tubuh Muhammadiyah dari perspektif politik Hannah Arendt seperti yang telah terpapar diatas, harus diakui, sulit menemukan perwujudannya. Tentang manusia politik sebagai manusia tindakan dalam pemikiran politik Arendt, baru menemukan bentuk asasinya pada tataran idealitas. Dari itu kemudian ketika melihat konteks realitas keberadaan manusia, manusia itu sendiri sudah berada berlabel dengan banyak sebab yang membangun (menstruktur) kediriannya. Sehingga ia disebut sebagai *akhi/ukhti* PKS, warga Muhammadiyah, mahasiswa dan lain sebagainya. Manusia sebagai manusia tindakan dalam bingkai dakwah—pada dasarnya masih merupakan perluasan dari ruang privat—boleh jadi termotivasi oleh nilai agama, atau oleh ideologi gerakan. Sedangkan keotentikan manusia sebagai manusia politik, hampir-hampir merupakan dorongan dari dalam pemaknaan nilai agama atau ideologi gerakan, hal demikian jelas bukan tindakan otentik manusia.

Politik yang bermakna kebebasan untuk, dan kebebasan tersebut dijalankan dalam bingkai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, menemukan korelasinya bahwa dakwah yang dijalankan adalah jika memang benar-benar “menyeru kepada kebaikan” sebagai “yang politik”, sedangkan “*munkar*: keburukan” sebagai “yang apolitis”. Begitu “menyeru kepada kebaikan” seperti yang dijalankan oleh PKS tetapi dengan jalan dakwah merangsek masuk ke Muhammadiyah, “kebaikan” yang sekiranya dituju, menghantam “kebaikan”

43 Hannah Arendt, *The Human Condition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), hlm. 7, dalam Maurizio Passerin d'Entéves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, (judul asli: *The Political Philosophy of Hannah Arendt*) alih bahasa M. Shafwan, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 111.

Muhammadiyah. Jadi jalan dakwah PKS yang merangsek masuk ke amal usaha milik Muhammadiyah mungkin selaras dengan agenda politik dibalik layar gerakan *Tarbiyah* dan “(ke)baik(an)” baginya, tetapi tidak bagi Muhammadiyah.

“Yang apolitis” dari PKS/*Ikhwanul Muslimin*/gerakan *Tarbiyah* adalah ia ingin menjadikan Islam sebagai negara terwujud, sebagaimana yang tercatat pada cakupan konsep *Tarbiyah Islamiyah*, yaitu “... (5) Negara Islam, dengan sistem dan undang-undang yang harus ditegakkan di dalamnya.”⁴⁴ *Tarbiyah Islamiyah* secara ringkas adalah “proses penyiapan manusia yang shalih, agar tercipta suatu keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan dan tindakannya secara menyeluruh”,⁴⁵ yang oleh seorang ideolog Ikhwan: Sa’id Hawwa, meliputi dari terbentuknya (1) individu, (2) rumah tangga, (3) masyarakat, (4) pemerintah Islam, *Daulah Islam*, tegaknya *Daulat* dan *Khilafah Islamiyah*, (5) dan Dunia yang sepenuhnya tunduk kepada Allah Swt.⁴⁶ Poin pertama, PKS cukup berjalan melalui kegiatan internalnya, sembari terus mengibarkan bendaranya pada kalangan mahasiswa melalui wadah organisasi gerakan KAMMI, melalui LDK, dan Rohis di sekolah-sekolah. Pada lingkup keluarga, dibawah jargon sunnah Nabi, poligami menjadi selimut penyebarannya.

Untuk poin ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah kita tahu memiliki banyak aset atas keduanya. Sekolah-sekolah yang berlabel Muhammadiyah, Rumah Sakit-Rumah Sakit milik Muhammadiyah banyak terdapat di Yogyakarta, berpotensi besar digunakan sebagai media dakwah, selain juga sebagai pendulang kapital, tanpa menafikan layanan utama kepada masyarakat. Sembari berdakwah, infiltrasi dilakukan PKS, melalui aktifitas pengajian, melalui kader-kader Muda Muhammadiyah maupun para anggota Muhammadiyah yang belum begitu mengakar kuat ke-Muhammadiyah-annya, yang kemudian terpikat oleh daya persona dakwah PKS, seperti pada kasus di atas.

Poin terakhir, seperti yang dibayangkan PKS (gerakan *Tarbiyah*; *Ikhwanul Muslimin*) mengarah ke tujuan pada ketunggalan, yaitu *Daulah Islam*. Dengan begitu, ia akan merembet ke tatanan masyarakat, dan secara langsung mengancam kepluralan. Secara kasat mata terlihat dari jenis pakaian model *jilbaber* dan terdengar

44 Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, hlm. 30.

45 *Ibid*, hlm. 25.

46 Sa’id Hawwa, *Membina Angkatan Muhajid: Studi Analitis atas Konsep Dakwah Hasan Al-Banna dalam Risalah Ta’lim*, (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 55-56.

dari panggilan *akhi/uhkti* diantara anggota, kader kelompok mereka, serta kultur ke-Timur-Tengah-annya. Pembawaan serta aneka ragam bentuk dari yang *Ikhwan* itu, seperti yang dikhawatirkan serius oleh Muhammadiyah, NU, maupun kalangan intelektual Islam Indonesia, dengan sendirinya berdampak pada sosio-kultur keislaman. Islam yang demikian beragam digiring menjadi tunggal oleh PKS. Infiltrasi PKS dalam tubuh Muhammadiyah mengambil gerak yang senyap-mimijam istilah Farid-seperti “virus”, kekerasan tidak tampak padanya, tetapi lebih ampuh dalam menjalankan agenda kepentingan politik plus dakwah PKS. Tinggal menunggu waktu.

Berkaitan dengan tindakan kader *Tarbiyah* (PKS) yang “menggasak” rumah Muhammadiyah, pada sisi kepentingan Muhammadiyah, sudah pasti menghantam lahan dakwah yang telah dibangun oleh Muhammadiyah. Pada sisi lain, keduanya, baik PKS maupun Muhammadiyah, sama-sama mendesakkan kepentingan dakwahnya yang bersifat privat ke ruang publik. Ruang publik tidak bisa diakuisisi oleh kepentingan dakwah, partai maupun oleh nilai-nilai agama yang terformulasikan menjadi basis ideologi organisasi maupun gerakan. Bahwa ruang publik ada, maupun diperjuangkan untuk ada, tetapi tidak dalam kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, kelompok, maupun organisasi. Ruang publik adalah milik bersama.

Ruang publik sebagai ruang penampakan individu-individu yang unik, dengan sendirinya mensyaratkan keberanian manusia dan konsekuensi yang harus dihadapi. Keberanian untuk tampil tanpa membawa-bawa kepentingan partai plus dakwah maupun organisasi. Dalam ruang bersama demikian itu, tidak ada ketunggalan, baik ia sebagai anggota *Tarbiyah*, maupun ia sebagai warga Muhammadiyah. Atribut-atribut ke-*Tarbiyah*-an maupun ke-Muhammadiyah-an seharusnya ditanggalkan, dengan begitu manusia sebagai manusia politik, otonom dan setara tampil dihadapan manusia lain dalam kehidupan yang pluralistik.

Dalam dimensi kepluralan pada kalangan PKS/*Ikhwan*/*Tarbiyah* sendiri, cenderung hampir tidak ditemukan, semua terlihat seragam, sama dalam satu panduan, apalagi berdiri pemangku tugas (sebagai patron) pembinaan kalangan *Ikhwan*. *Murabbi* (pendidik; guru) hampir-hampir menguasai tindak-tanduk, hajat hidup *akhi/uhkti*, anggota, kader PKS. *Murabbi* dengan otoritasnya mengarahkan, sekaligus menjadi pembimbing dalam rangka perkaderan. Dengan begitu, tindakan *akhi/uhkti* disetir oleh sang *Murabbi*. *Akhi/uhkti* PKS dengan

sendirinya tidak mempunyai kebebasan bertindak diluar ketentuan yang telah digariskan. Sebelum beranjak dari ketidakbebasan tersebut, manusia (seperti *akhi/ukhti* PKS) belum bisa dikatakan bertindak secara otentik, itupun jika mampu keluar dari keterikatannya, masih dalam balutan kebebasan dari (*liberation*), belum sampai kebebasan untuk (*freedom*).

Politik dalam konteks dakwah PKS dalam tubuh Muhammadiyah, dalam pemikiran politik Hannah Arendt, terbaca masih dalam kategori penguasaan. Infiltrasi yang dilakukan kader-kader *Tarbiyah* masuk ke dalam amal usaha Muhammadiyah, secara tindakan–tetapi bukan dalam pengertian tindakan dalam ketegori manusia politik–adalah dalam ranah pertarungan ranah privat, untuk kepentingan politik praksis plus dakwah PKS sendiri. Dakwah, sekalipun hal itu ditujukan kepada khalayak umum, pada dasarnya merupakan kepentingan privat dari agama. Dalam berdakwah tetap tidak meninggalkan sisi privatnya, bahwa ia berdakwah benar, ber-*amar ma'ruf*: “menyeru kepada kebaikan” sebagai “yang politik”, tetapi berbalut kepentingan lain maupun kepentingan politik secara khusus. Kepentingan dakwah (agama) tetap sifatnya ia privat. Dihadapan dakwah dan kepentingan privat lainnya, ruang publik menjadi arena perebutan kuasa atas dasar kepentingan yang sifatnya privat.

Kritik pun patut dilayangkan kepada Muhammadiyah. Kritik atas pengelolaan, pembinaan warga Muhammadiyah oleh Muhammadiyah sendiri. Tidak mungkin begitu saja kasus diatas terjadi. Khusus terkait konversi yang menimpa Angkatan Muda Muhammadiyah ke PKS, dapat ditinjau sebagai aktivisme kelas menengah Islam. Kelas menengah Islam, sebagai kelas yang memiliki latar belakang keislaman yang masih rentan–untuk tidak mengatakan masih dangkal–menemukan bentuk Islam yang *kaffah*, terpantul para diri *akhi/ukhi* PKS. Secara ekspresif, Islam yang *kaffah* tampak sedari yang fisik, sampai segala bentuk yang dikatakan secara Islami ala *akhi/uhkti* PKS. Keberadaan kelas menengah ini sendiri sebenarnya–dengan catatan memasukkan ulasan Hikmat Budiman–muncul dari perkembangan lanjut dari kapitalisme.⁴⁷ Pada satu keadaan ia bisa menjadi kelas yang mendorong perubahan, namun yang sering tampak sebagai kerumunan, sebagai bentuk dari gambaran *massa*. Kaitannya dengan pemikiran politik Arendt, *massa* bertindak atas dasar kepentingan ruang privat. *Massa* cenderung memburu kepuasan dan sesaat, apalagi berbicara tanpa

47 Lihat Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).

mempertimbangkan orang lain yang tidak hadir bersama dalam ruang publik, sama sekali tidak bertindak secara politis.

Berkaitan—sebagai tambahan—dengan pendasaran Arendt atas *polis* Yunani sebagai ruang publik, secara sosiologis menemukan bentuk lebih lanjut pada abad ke-18 pada masyarakat Eropa. Pada masyarakat Eropa tempat banyak orang berkumpul, berdiskusi, ataupun sekedar berbincang-bincang di *cafe*, *literary salon* atau *pubs* yang menjamur di Inggris, Jerman dan Prancis, merupakan tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga.⁴⁸ Tempat-tempat seperti yang dibahas oleh Hardiman dalam terkait ruang publik menurut Hannah Arendt dan Jürgen Habermas, keberadaannya di Yogyakarta menemukan bentuknya pula seperti alun-alun, layaknya alun-alun kota (*plaza*) di Eropa, dan angkringan yang lebih egaliter, merakyat dibandingkan *cafe*. Namun, konsep ruang publik Arendt, hampir sulit ditunjuk, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali keberadaannya. Setuju dengan “Komersialisasi” dari Hardiman, ruang publik itupun kini telah menjadi arena kuasa kapital, seiring modernisme mendera kehidupan manusia bersama. Ruang publik Hannah Arendt, sekali lagi, menjadi tantangan untuk dihadirkan, maupun diperjuangkan untuk ada, guna mengatasi persoalan-persoalan yang mengginggapi “kebabasan dan keragaman” manusia.

D. Penutup

Pemikiran politik Hannah Arendt tidak bisa dilepaskan dari konsepnya tentang manusia politis. Manusia belum menjadi manusia ketika ia tidak bertindak bebas. Dengan begitu kebebasan manusia adalah alasan adanya dari politik. Kebebasan manusia hanya terjadi dalam ruang publik. Hadirnya manusia secara otentik dalam ruang publik yang pluralis, mengarahkan manusia sebagai manusia tindakan adalah satu-satunya aktifitas manusia yang tak berulang, dengan begitu itu ia (seharusnya) otentik dihadapan manusia-manusia lain untuk mengatasi persoalan yang mendera mereka secara argumentatif-diskursif, setara dan otonom.

Arendt juga membedakan antara ruang privat dan ruang publik. Keduanya dihidupi oleh manusia. Namun dalam ruang privat, manusia

48 Lihat F. Budi Hardiman, “Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jürgen Habermas” dalam F. Budi Hardiman (ed), *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokrasi” dari Polis sampai Cyberspace*, hlm. 186.

tidak bebas mengekspresikan dirinya, terbelenggu oleh struktur penguasaan dan pemaksaan, seperti layaknya dalam keluarga; baik yang bersifat ekonomi, sosial, religius maupun kultural. Untuk keluar dari yang privat, manusia harus berani bertindak atas nama dirinya secara otentik dalam ruang publik. Dalam ruang publik manusia bertindak dalam kerangka diskursif-argumentatif, sebab manusia disamakan sekaligus dibedakan oleh ketidaksamaan masing-masing, bersama-sama ke muka publik tanpa diintervensi oleh kepentingan, hasrat ruang privat.

Berkaitan dengan dakwah PKS dalam tubuh Muhammadiyah, dari perspektif politik Hannah Arendt, terbaca dalam kategori politik adalah penguasaan. Penguasaan yang nantinya akan mengarah yang apolitis: Daulah Islam, dan seterusnya menafikan kebebasan serta kepluralan sebagai prasyarat manusia politik. Sedangkan keberadaan manusia sebagai manusia politik, tidak bisa dilebur dalam satu entitas yang sama, seragam. Jalan dakwah PKS dalam tubuh Muhammadiyah merupakan perebutan ruang “publik” yang sebetulnya didesakkan dari asalnya yang privat. Perebutan ruang privat terkait lahan dakwah yang berhimpitan, membawa pesan membahayakan kepluralan, disamping kebebasan sebagai alasan adanya yang politik. Dari apa yang dibayangkan PKS/*Ikhwanul Muslimin*/gerakan *Tarbiyah* dalam cakupan konsep *Tarbiyah Islamiyah*, Islam mengarah menuju dalam bentuk negara, dengan begitu Islam menuju ketunggalan, dan ketunggalan kebalikan dari yang politik, berarti ia apolitis.

Aktivisme dari gerakan *Tarbiyah/Ikhwanul Muslimin*/PKS dilakukan dengan dua jalan sekaligus: politik plus dakwah. Kedua hal ini berkelindan, dan sulit untuk dilepas-pisahkan. Ruang publik sebagai ruang penampakan bersama, terformulasi baku oleh PKS, terbukti dari perangkat-perangkat pendidikan ala *Tarbiyah*. Dakwah PKS dalam tubuh Muhammadiyah secara khusus demi terwujudnya politik secara khusus, sedekat-dekatnya Islam versi *Ikhwanul Muslimin* yang mulai merasuk dalam tubuh Muhammadiyah. Islam versi *Ikhwanul Muslimin* sebagai bentuk tatanan baru sama sekali, yang mengarah kepada ketunggalan; ketunggalan dalam berislam, ketunggalan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam ketika menjadi negara, dengan begitu Islam menjadi tunggal, menjadi satu warna, satu wajah, dengan sendirinya ia menafikan “kebebasan dan keragaman”.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Mahmud, Ali, 2004, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia.
- _____, 2007, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid I&2, (judul asli: *Manhaj at-Tarbiyah inda al-Ikhwanul Muslimin*) penj. Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Hamdi, Rihdo, "Ber-tabayyun-lah Atas Soal Mu'alimin dan Mu'alimat (Tanggapan untuk Tulisan Farid Setiawan)", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-31 Mei 2006.
- Arendt, Hannah, 1958, *The Human Condition*, Chicago: The University of Chicago Press.
- _____, 1993, *Asal-usul Totalitarianisme Jilid I Antisemitisme*, penj. A. Agus Nugroho, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____, 1993, *Was Ist Politik?*, München: Piper Verlag.
- _____, 1994, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, New York: Pinguin Books.
- _____, 1996, *Vita Activa*, München: Piper Verlag.
- _____, 2005, *The Promise of Politics*, New York: Schocken Books.
- Budiman, Hikmat, 2002, *Lubang Hitam Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Dwi Ananda, Dicky, "Mendaras Islam Politik dengan Kerangka Materialisme Sejarah", dalam *Indoproggres.com*, 22 Juli 2014.
- Ettinger, Eźlbieta, 2005, *Selingkuh Dua Pemikir Raksasa Hannahh Arendt-Martin Heidegger*, penj. P Hasudungan Sirait & Rin Hindryati P, Jakarta: Nalar.
- Hardiman, F. Budi (ed), 2010, *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokrasi" dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi, "Hannah Arendt: Berpikir dalam Keadaan Luar Biasa", Sebuah Pengantar dalam Agus Sudiby, 2012, *Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- _____, 2011, *Massa, Teror dan Trauma Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*, Yogyakarta: Lamalera.

- _____, "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jürgen Habermas" dalam F. Budi Hardiman (ed), 2010, *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokrasi" dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, Noorhaidi, 2012, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi dan Teori*, Yogyakarta: SukaPress.
- Hawaa, Sa'id, 2005, *Membina Angkatan Muhajid: Studi Analitis atas Konsep Dakwah Hasan Al-Banna dalam Risalah Ta'lim*, Solo: Intermedia.
- Kumar, Deepa, 2012, *Islam Politik Sebuah Analisis Marxis (Political Islam: A Marxist Analysis)*, penj. Fitri Mohan, Yogyakarta: Resist Book.
- Ma'ruf, Asrori, "Gesekan Ideologi Ikhwanul Muslimin (PKS) dengan Muhammadiyah" dalam Zakiyuddin Baidhawyy dkk, 2007, *Migrasi Jamaah: Tantangan Dakwah Muhammadiyah Jelang Satu Abad*, Yogyakarta: Panji.
- Machmudi, Yon, 2005, *Partai Keadilan: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung: Harakatuna Publishing.
- Magnis Suseno, Franz, 1995, "Kata Pengantar" dalam *Asal-usul Totalitarianisme Jilid III Totalitarianisme*, penj. J.M Soebijanta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Furkan, Aay, 2004, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Bandung: Teraju.
- Muin Malilang, Abdul, "Polemik Madrasah Mu'aliman dan Mu'alimat, Hiperbolis atau Keprihatinan?", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-31 Mei 2006.
- Munir Mulkhan, Abdul, "Sendang Ayu; Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 Januari 2006.
- Nashir, Haedar, 2006, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Noer, Deliar, 1997, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan.
- Panimbang, Fahmi, "**Politik sebagai Tindakan: Studi Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt**", dalam http://panimbang.blogspot.com/2006/01/politik-sebagai-tindakan_28.html. Diakses pada 8 November 2014.

Passerin d'Entèves, Maurizio, 2003, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, (judul asli: *The Political Philosophy of Hannah Arendt*) alih bahasa M. Shafwan, Yogyakarta: Qalam.

pks.or.id.

Rakhmat, M. Imdadun, 2005, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

_____, 2008, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS.

S. Royadi Langgut-Tere, Eddie, *Manusia Politis Menurut Hannah Arendt Pertautan antara Tindakan dan Ruang Publik, Kebebasan dan Pluralitas, dan Upaya Memanusiakan Kekuasaan*, Makalah yang presentasikan pada Kuliah Umum Filsafat Komunitas Salihara, Jakarta, 6 April 2011.

Said Damanik, Ali, 2001, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju.

Setiawan, Farid, "Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkan)", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 20 Februari 2006.

_____, "Tiga Upaya Menyelamatkan Mu'alimin dan Mu'alimat", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 April 2006.

Sindhunata, "Politik Pengampunan" dalam *Basis* Edisi Khusus Hannah Arendt, No.03-04, Tahun ke-56, Maret-April 2007.

_____, "Tanda-Tanda Zaman: Berteguh pada Janji" dalam *Basis* Edisi Khusus Hannah Arendt, No.03-04, Tahun ke-56, Maret-April 2007.

Sucipto, "Sekolah Kader Tidak Boleh Mati (Tanggapan untuk Tulisan Farid Setiawan)", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-31 Mei 2006.

Sudibyoy, Agus, 2012, *Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Wahid, Abdurrahman (ed), 2009, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute.

Wahid, Nur, "Dilema Islam Politik" dalam *Lampung Post*, 24 Februari 2013.

www.salihara.org.